



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

# **TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023**

## **DAFTAR ISI**

- Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2023
- Lampiran Data Dukung



Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Raden Puguh Puyung Praya



<https://lomboktengahkab.go.id>



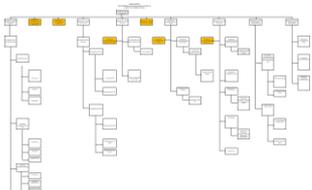
+6281907601122



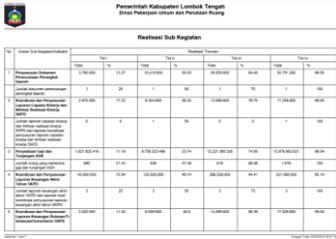
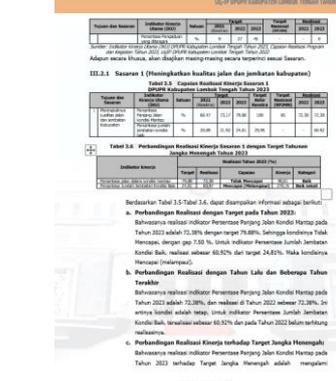
[perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com](mailto:perencanaanpuprlomboktengah@gmail.com)



**Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut LHE AKIP Internal terhadap LKJIP**  
**(Per Mei 2024)**

No	Kode	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
1.	1.b	PK 2023 dan 2024 belum di formalkan (belum di stampel)	a. Telah dilakukan penstempelan PK Tahun 2023 dan 2024 b. PK 2023 dan 2024 yang telah dilakukan penstempelan telah diunggah pada aplikasi E-SAKIP Reviu ( <a href="https://esr.menpan.go.id/">https://esr.menpan.go.id/</a> )	 <b>PK 2024</b>	Selesai
				 <b>PK 2023</b>	Selesai
	1.b	Masih terdapat sasaran kinerja yang bersifat output, serta indikator kinerja tidak relevan dengan sasaran yang ingin dicapai	Telah dilakukan revisi dan revisi IKU Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun 2023 berdasarkan PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah	 IKU yang telah disesuaikan sasaran kerjanya agar tidak berbahasa output.	Selesai
2	1.b	Pohon kinerja telah dibuat. Namun belum delaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan	a. Telah dilakukan revisi IKU b. IKU telah diunggah pada aplikasi E-SAKIP Reviu ( <a href="https://esr.menpan.go.id/">https://esr.menpan.go.id/</a> ) c. Cascading telah termuat di E Sakip Reviu	 a. IKU yang telah direvisi b. Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan telah terlaksananya di Cascading yang dibuat secara terpisah	Selesai
				 Cascading implementasi dari pohon kinerja yang telah memuat kondisi/hasil di setiap level jabatan	



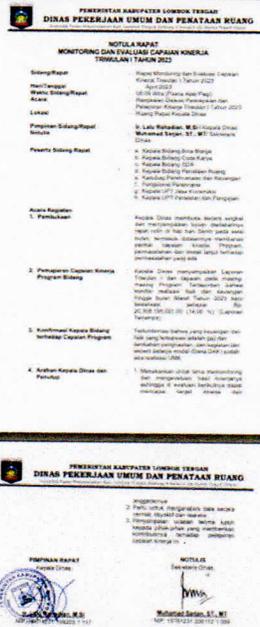
No	Kode	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
	2.b	Belum ada di upload Laporan E-Money Bapperida per Triwulan	a. Pada dasarnya telah dilakukan e-monev Bapperida per Triwulan pada Tahun 2023 b. Telah diunggah bukti dukungnya pada aplikasi E-SAKIP Reviu ( <a href="https://esr.menpan.go.id/">https://esr.menpan.go.id/</a> )	 E Monev Bapperida Triwulan-an	Selesai
	3.a	Mengupload Laporan Kinerja di Aplikasi PPID	Telah dilakukan upload Laporan Kinerja di PPID	 Daftar Informasi Publik di PPID yang telah memuat Dokumen Perencanaan DPUPR di Tahun 2024  Proses memasukkan ke PPID	Selesai
	3.b	Laporan Kinerja belum sesuai dengan yang diamanatkan PermenPANRB 53 Tahun 2014	a. Telah dilakukan penstrukturan ulang terhadap muatan Laporan Kinerja, dengan menambah muatan internal yang dirasa perlu	 Struktur Laporan	Selesai
3	3.b	Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	a. Sebenarnya sebelumnya telah dilakukan, namun distrukturkan ulang dan disajikan ulang kembali perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan b. Dimulai dari Sub Bab III.2.1 sampai dengan III.2.9, dan dari Tabel 3.5 sampai 3.43	 Telah dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	Selesai



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 Komplek Pusat Pemerintahan Gedung A Lt. 4 Jalan Raden Puguh Praya 83511  
 Website : <http://dinaspujr.lomboktengahkab.go.id> E-mail : [perencanaanpujrlomboktengah@gmail.com](mailto:perencanaanpujrlomboktengah@gmail.com)

No	Kode	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
	3.b	Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	a. Sebenarnya sebelumnya telah dilakukan, namun distrukturkan ulan dan disajikan ulang kembali perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah b. Dimulai dari Sub Bab III.2.1 sampai dengan III.2.9, dan dari Tabel 3.5 sampai 3.43	c. <b>Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah:</b> Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami  Halaman III-5   80  Telah dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Selesai
	3.b	Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	a. Sebenarnya sebelumnya telah dilakukan, namun distrukturkan ulan dan disajikan ulang kembali perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah b. Dimulai dari Sub Bab III.2.1 sampai dengan III.2.9, dan dari Tabel 3.5 sampai 3.43	b. <b>Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir</b> Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 adalah 72,38%, dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72,38%. Ini artinya kondisi adalah tetap. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, terealisasi sebesar 60,92% dan pada Tahun 2022 belum terhitung realisasinya.  Telah dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahun-tahun sebelumnya	Selesai
	3.b	Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	a. Sebenarnya sebelumnya telah dilakukan, namun distrukturkan ulan dan disajikan ulang kembali perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah b. Dimulai dari Sub Bab III.2.1 sampai dengan III.2.9, dan dari Tabel 3.5 sampai 3.43	e. <b>Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan</b> Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut: 1. Secara prinsip, dalam pencapaian kinerja Persentase Jalan Mantap, dibutuhkan dua Program/Kegiatan, yaitu: a. Program/Kegiatan untuk mempertahankan kondisi Jalan yang sudah dalam Status Mantap yang telah mencapai 72,38 % b. Program/Kegiatan untuk meningkatkan kondisi Jalan menjadi Mantap pada Jalan yang Kondisinya belum mantap dengan persentase 27,62 % 2. Tidak tercapainya Target Persentase Jalan Mantap sebesar 79,88 % disebabkan oleh kombinasi faktor yang saling berkaitan, diantaranya: a. Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan secara rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari mempertahankan kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang jalan yang harus tetap dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada Program Pemeliharaan Jalan. b. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah mencapai 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya  Telah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan  Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus 2. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian 300 DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1. 3. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap 4. Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan 5. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata 6. Berkoordinasi dengan Bappeda terhadap aspirasi masyarakat dalam hal pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang  Telah dilakukan upaya nyata	Selesai



No	Kode	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung	Status/Progress Penyelesaian
	3.c	Belum ada notulen rapat yang diupload	Telah diupayakan dilakukan pada Laporan Kinerja Tahun 2023	 <p>Notula Rapat Triwulan yang dengan Kepala Dinas sebagai Pimpinan Rapat</p>	Selesai

Sumber: LKj-IP DPUPR Tahun 2023

Praya, 29 Mei 2024  
 Kepala Dinas  
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,



**Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**  
 NIP. 196712311992031117



## LAMPIRAN DATA DUKUNG



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Jabatan : **BUPATI LOMBOK TENGAH**

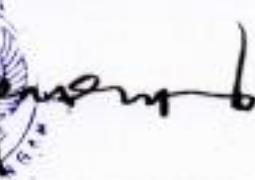
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 03 Maret 2023

Pihak Kedua

BUPATI LOMBOK TENGAH,  
  
**H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP**

Pihak Pertama

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
  
**IR. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah dilakukan Penstempelan



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD SARJAN, ST. MT**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Ir. LALU RAHADIAN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

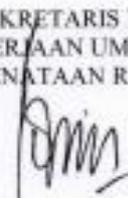
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Praya, 07 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

  
KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG  
**IR. LALU RAHADIAN, M.Si**  
NIP. 196712311992031117

  
SEKRETARIS DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
**MUHAMAD SARJAN, ST. MT**  
NIP. 19761231 200112 1 009

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah dilakukan Penstempelan



INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH															
KODE	TUJUAN	INDEKATOR	SASARAN	INDEKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHIR	
									1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)		
T1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Infrastruktur Wilayah			Indeks Infrastruktur = $(20 \times S1) + (20 \times S2) + (20 \times S3) + (20 \times S4) + (20 \times S5)$			50%	50%	61%	60%	70%	70%	70%	
S1		Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Kabupaten		Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap $\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan kondisi mantap}}{\text{Jumlah Panjang Jalan total}} \times 100\%$	Jumlah Panjang Jalan kondisi mantap	Jumlah Panjang Jalan total	Jumlah jalan belang dua lajur	DPLUPR	66,07	73,17	79,88	86,58	93,29	99,99	100
				Persentase jumlah jembatan kondisi baik $\frac{\text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah Jembatan total}} \times 100\%$	Jumlah Jembatan kondisi baik	Jumlah Jembatan total			20,89	21,50	21,82	24,81	25,57	25,95	25,95
S2		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau		Persentase sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik $\frac{\text{jumlah gedung pelayanan publik dalam kondisi baik}}{\text{Total gedung pelayanan publik}} \times 100\%$	jumlah gedung pelayanan publik dalam kondisi baik	Total gedung pelayanan publik		DPLUPR	60	62	64	66	68	70	70
S3		Meningkatnya layanan jaringan irigasi		Indeks Kinerja Irigasi	Mengisi formulir survey index kinerja irigasi			DPLUPR	51,4	54	56,9	58,3	60,5	62,8	62,8
S4		Meningkatnya kelayakan jaringan air minum		Persentase penduduk yang dilayani dengan akses terhadap pasokan air minum $\frac{I \text{ Penduduk yang terlayani}}{I \text{ seluruhnya}} \times 100\%$	I Penduduk yang terlayani	I seluruhnya / Kota Persehat	Data Akuisi Air Bersih Jaringan Pipaan dan Instalasi Jaringan Pipaan Lintang	DPLUPR	78,81	80,37	81,82	83,44	85,81	88,56	88,56
S5		Meningkatnya kelayakan jaringan sanitasi yang dapat diakses oleh masyarakat		Cakupan Pelayanan SPALDS $\frac{\text{jumlah rumah yang terlayani jaringan sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kapasitas penduduk pada wilayah terbagian}} \times 100\%$	jumlah rumah yang terlayani jaringan sanitasi di wilayah SPALD	Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALDS-T	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)	DPLUPR		0,55	2,24	3,80	5,62	7,31	7,31
				Cakupan Pelayanan SPALDT $\frac{\text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah & air limbah di wilayah SPALD}}{\text{Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALDS-T}} \times 100\%$	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah & air limbah di wilayah SPALD	Jumlah Rumah di wilayah pengembangan SPALDS-T	Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)			0,55	2,24	3,80	5,62	7,31	7,31

KODE	TUJUAN	INDEKATOR	SASARAN	INDEKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					KONDISI AKHIR	
									1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)		
		Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang			Indeks = $(40 \times S6) + (20 \times S7) + (40 \times S8)$			DPLUPR	13	38	42	62	81	100	100
S6		Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang		Persentase penyusunan materi teknis RTR $\frac{\text{Jumlah Materi Teknis RTR tersusun}}{\text{Jumlah Materi Teknis RTR keseluruhan}} \times 100$	Jumlah Materi Teknis RTR tersusun	Jumlah Materi Teknis RTR keseluruhan		DPLUPR	11	22	33	55	76	100	100
				Jumlah Perda dan Perkada $\frac{\text{Jumlah Perkada RTR}}{\text{Jumlah Perkada RTR keseluruhan}} \times 100$	Jumlah Perkada RTR	Jumlah Perkada RTR keseluruhan			11	22	33	55	76	100	100
S7		Meningkatnya Pemertan Ruang		Jumlah Pemertan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang $\frac{\text{Jumlah Pemertan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang}}{\text{Jumlah Pemertan KKPR keseluruhan}} \times 100$	Jumlah Pemertan KKPR sesuai Rencana Tata Ruang	Jumlah Pemertan KKPR keseluruhan	100	DPLUPR	16	31	50	67	83	100	100
S8		Meningkatnya Pengendalian Pemertan Ruang		Jumlah lokasi KKPR yang dilalui $\frac{\text{Jumlah Lokasi Pemertan KKPR}}{\text{Jumlah Lokasi Pemertan KKPR keseluruhan}} \times 100$	Jumlah lokasi KKPR yang dilalui	Jumlah Lokasi Pemertan KKPR keseluruhan	100	DPLUPR	16	31	50	67	83	100	100
				Jumlah pengaduan yang ditanggapi $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditanggapi}}{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100$	Jumlah pengaduan yang ditanggapi	Jumlah Pengaduan yang masuk			9	27	45	64	82	100	100

**Definis Operasional:**

1. Indeks Infrastruktur adalah suatu metode atau alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas, kuantitas, dan efisiensi infrastruktur dalam suatu wilayah, negara, atau proyek tertentu. Infrastruktur yang diukur melalui indeks infrastruktur di bawah ini adalah infrastruktur yang memiliki kuantitas DPLUPR.

2. Jumlah panjang jalan kondisi mantap adalah jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang.

3. Jumlah jembatan kondisi baik adalah jumlah jembatan dalam kondisi baik.

**Restang Nilai Indeks Irigasi:**

1. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi > 90%, pemeliharaan rutin.

2. Indeks Kondisi Jaringan Irigasi 80-90%, pemeliharaan berkala.



KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					KISI KISI AKH
									1	2	3	4	5	
									1	2	3	4	5	
									(2021)	(2021)	(2021)	(2021)	(2021)	

4. Indeks Kinerja target (target Performance Index) adalah nilai yang digunakan untuk mengukur dan mengontrol kinerja sistem sipre. Indeks ini memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan sipre dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti penyediaan sipre yang cukup untuk pelayanan, peningkatan produktivitas, penghematan sipre, dan pengurangan kerugian akibat kelebihan atau kekurangan sipre. Perbaikan indeks kinerja sipre dilakukan dengan cara melakukan survei dengan mengisi formulir survei index kinerja sipre.

5. 7. Indeks IRI total adalah jumlah IRI Kabupaten

6. Jumlah penduduk terlayani adalah jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan (sumur dangkal, sumur dalam/water bo, dan pemungup sipre)

7. Jumlah penduduk Kabupaten adalah seluruh jumlah penduduk yang tercatat pada data kependudukan

8. SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik terpasang/MCK individual yang berada di wilayah Lombok Tengah

9. SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik terpasang/MCK komunal yang berada di wilayah Lombok Tengah

10. SPLT adalah metode pengolahan limbah sipre

11. Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Indeks Persepsi tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah

12. Perencanaan Ruang adalah suatu proses untuk menentapkan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah

13. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (KRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan Rencana Tata Ruang (RTR) di Kabupaten Lombok Tengah melalui Keserasian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

15. Keserasian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah keserasian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR di Kabupaten Lombok Tengah

16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tata-rata Ruang sesuai RTR di Kabupaten Lombok Tengah

17. Materi Teknik RTR adalah buku rencana dan tata rupa RTR di Kabupaten Lombok Tengah

18. Penda Perkada RTR adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagai pedik legal Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah sesuai peraturan yang berlaku

19. Pengawasan adalah pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui pelaporan dari unit pelaksana dan daring

3. Kondisi terapan Iqasi 60-80%, pemeliharaan: SM (Special Maintenance)

KODE	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE					KISI KISI AKH
									1	2	3	4	5	
									1	2	3	4	5	
									(2021)	(2021)	(2021)	(2021)	(2021)	

10. Jumlah 10 total adalah jumlah IRI Kabupaten

11. Jumlah penduduk terlayani adalah jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan (sumur dangkal, sumur dalam/water bo, dan pemungup sipre)

12. Jumlah penduduk Kabupaten adalah seluruh jumlah penduduk yang tercatat pada data kependudukan

13. SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik terpasang/MCK individual yang berada di wilayah Lombok Tengah

14. SPALDS adalah sistem pengolahan air limbah domestik terpasang/MCK komunal yang berada di wilayah Lombok Tengah

15. SPLT adalah metode pengolahan limbah sipre

16. Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang adalah Indeks Persepsi tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Tengah

17. Perencanaan Ruang adalah suatu proses untuk menentapkan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah

18. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah (KRW) Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan Rencana Tata Ruang (RTR) di Kabupaten Lombok Tengah melalui Keserasian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

20. Keserasian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah keserasian antara kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR di Kabupaten Lombok Tengah

21. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tata-rata Ruang sesuai RTR di Kabupaten Lombok Tengah

22. Materi Teknik RTR adalah buku rencana dan tata rupa RTR di Kabupaten Lombok Tengah

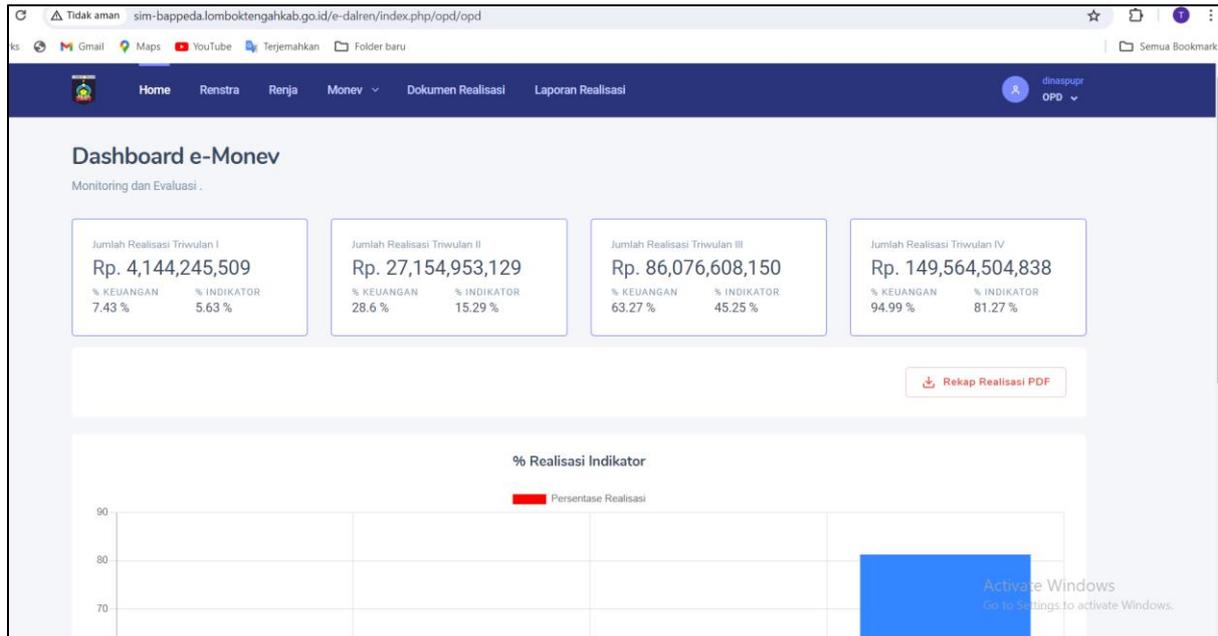
23. Penda Perkada RTR adalah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah sebagai pedik legal Rencana Tata Ruang di Kabupaten Lombok Tengah sesuai peraturan yang berlaku

24. Pengawasan adalah pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui pelaporan dari unit pelaksana dan daring

Penilaian anhand batas index Infrastruktur:  
1. 0-25 = Kurang,  
2. 26-50 = Sedang,  
3. 51-75 = Baik,  
4. 76-100 = Sangat Baik

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
  
Dr. LALE RAHMAN, M.Si  
NIP. 196712311992031117

Indikator Kinerja Utama yang telah Dilakukan Perbaikan dengan Menambahkan Crosscutting dan Perbaikan Bahasa Sasaran



**Laporan Monev**  
Monitoring dan Evaluasi.

Triwulan I | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV

+ Tambah | Laporan PDF | Laporan Excel

Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program .	Rp.170,089,111,238	Rp.4,144,245,509	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM(%)		% Anggaran (7.43%)	% Indikator (5.63 %)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah

Faktor Pendorong/Penghambat dan Tindak Lanjut	Keterangan
1. Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	
2. Faktor penghambat pencapaian kinerja:	
3. Tindak Lanjut Yang di Perlukan Dalam Triwulan Berikutnya:	

Laporan e-Monev yang telah diaktualisasikan di Aplikasi E-Monev Bapperida (<http://sim-bappeda.lomboktengahkab.go.id/>)



The screenshot shows the PPID website interface. At the top, there are navigation tabs: HOME, PROFILE, **INFORMASI PUBLIK**, PROSEDUR, PELAYANAN, REGULASI, KONTAK, and DOWNLOAD. A search bar is present with a 'Cari Data' button. Below the search bar, there is a table with the following columns: No, Ringkasan Isi Informasi, Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi, Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi, Tahun, Bentuk Informasi yang Tersedia, and Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip. The table contains 6 rows of data. To the right of the table, there is a 'Kategori PPID' section with a list of categories and their counts. A 'Potongan & Sketsa' notification is visible in the bottom right corner.

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Tahun	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
1	BERITA ACARA FORUM OPD TAHUN 2025	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	5 Tahun
2	RPJMD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	5 Tahun
3	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2024	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
4	LKJIP DPUR Tahun 2023	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	5 Tahun
5	LPPD TAHUN 2023	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
6	Laporen Monev Capaian Kinerja	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun

The screenshot shows the PPID website interface with a sidebar menu on the right. The main table is similar to the one in the previous screenshot. The sidebar menu lists various document categories with their respective counts. A 'Potongan & Sketsa' notification is visible in the bottom right corner.

No	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Tahun	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip
8	POHON KINERJA DINAS PUPR	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	10 Tahun
9	Rekap Realisasi e-Monev	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
10	Rencana Aksi 2024	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
11	RENCANA KERJA (RENJA) 2024	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
12	RENSTRA DPUPR 2021-2026	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	5 Tahun
13	RINGKASAN RKA 2024	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 30 Mei 2024	2024	online	2 Tahun
63	LHKPN KEPALA DINAS PUPR TAHUN 2022	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 7 Maret 2024	2024	online	10 Tahun
64	LHKPN KEPALA BIDANG TATA RUANG 2022	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Praya, 7 Maret 2024	2024	online	10 Tahun
	LHKPN KEPALA	Dinas Pekerjaan	Praya, 7			

- Laporan Keuangan: 481
- Himbauan: 13
- Laporan Kinerja: 243
- Peraturan: 69
- Perjanjian: 40
- Profil SKPD: 66
- Surat Keputusan/ SK: 207
- Rencana Kerja: 191
- Standar Operasional Prosedur (SOP): 148
- Dokumen LHKPN: 251
- Kajian: 6
- Inventaris Barang: 18
- Jadwal Kegiatan: 4
- PERDAAAPBD: 3
- DOKUMEN LPPD: 1
- DOKUMEN RPJMD: 1

Dokumen Perencanaan, Pengaturan dan Pelaporan Kinerja yang Telah Diunggah di PPID ([https://ppid.lomboktengahkab.go.id/daftar-informasi-publik?id\\_skpd=100022&tahun=](https://ppid.lomboktengahkab.go.id/daftar-informasi-publik?id_skpd=100022&tahun=))

**LKJ-IP DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023		2022	2023
	Persentase Pengaduan yang ditangani	%	9	27	45	-	-	0

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023, Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023, LKJIP DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022

Adapun secara khusus, akan disajikan masing-masing secara terperinci sesuai Sasaran.

### III.2.1 Sasaran 1 (Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten)

**Tabel 3.5 Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 1 DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2023**

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target			Target Akhir Renstra	Target Nasional (RPJMN)	Realisasi	
			2021 (Baseline)	2022	2023			2022	2023
1 Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	66.47	73.17	79.88	100	65	72.38	72.38
	Persentase jumlah jembatan kondisi baik	%	20.89	21.92	24.81	25,95	-	-	60.92

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Target Tahunan Jangka Menengah Tahun 2023**

Indikator kinerja	Realisasi Tahun 2023 (%)				
	Target	Realisasi	Capaian	Kinerja	Kategori
Persentase jalan dalam kondisi mantap	79,88	72,38	Tidak Mencapai	90,61	Baik
Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	24,81	60,92	Mencapai (Melampaui)	278,15	Baik sekali

Berdasarkan Tabel 3.5-Tabel 3.6, dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

**a. Perbandingan Realisasi dengan Target pada Tahun 2023;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 adalah 72.38% dengan target 79.88%. Sehingga kondisinya Tidak Mencapai, dengan gap 7.50 %. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, realisasi sebesar 60,92% dari target 24,81%. Maka kondisinya Mencapai (melampaui).

**b. Perbandingan Realisasi dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 adalah 72.38%, dan realisasi di Tahun 2022 sebesar 72.38%. Ini artinya kondisi adalah tetap. Untuk indikator Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik, terealisasi sebesar 60,92% dan pada Tahun 2022 belum terhitung realisasinya.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja terhadap Target Jangka Menengah;**

Bahwasanya realisasi indikator Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap pada Tahun 2023 terhadap Target Jangka Menengah adalah mengalami

Bukti Dukung pada Laporan LKJIP bahwa Telah dilakukan Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2023, Tahun tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah



**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Adapun penyebab capaian realisasi kinerja diantaranya sebagai berikut:

1. Secara prinsip, dalam pencapaian kinerja Persentase Jalan Mantap, dibutuhkan dua Program/Kegiatan, yaitu:
  - a. Program/Kegiatan untuk mempertahankan kondisi Jalan yang sudah dalam Status Mantap yang telah mencapai 72,38 %
  - b. Program/Kegiatan untuk meningkatkan kondisi Jalan menjadi Mantap pada Jalan yang Kondisinya belum mantap dengan persentase 27,62 %
2. Tidak tercapainya Target Persentase Jalan Mantap sebesar 79,88 % disebabkan oleh kombinasi faktor yang saling berkaitan, diantaranya:
  - a. Panjang jalan yang bisa diintervensi Program/Kegiatan Pemeliharaan secara rutin pada Tahun 2023 sebagai bagian dari mempertahankan kondisi mantap hanya sepanjang 218 km dari 586,19 km. Itu artinya ada gap/selisih sebesar 368,19 km antara panjang jalan yang harus tetap dipelihara secara rutin dengan panjang jalan yang diintervensi pada Program Pemeliharaan Jalan.
  - b. Panjang jalan yang harus dilakukan Peningkatan Jalan menjadi mantap adalah sebesar 7,50 % (60,74 km) dari realisasi tahun 2022 yang telah mencapai 72,38%. Namun, pada Program Rekonstruksi Jalan hanya

Bukti Dukung pada Laporan LKJIP bahwa Telah Memuat Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Kinerja



Adapun alternatif solusi yang bisa dan telah dilakukan oleh DPUPR di tahun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan/DED pada Program dengan memasukkan metode-metode tertentu/khusus. Misal untuk mengatasi masalah kondisi tanah dasar yang tidak stabil maka metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah sebagai berikut: Metode dilaksanakan dengan menggunakan consolidometer khusus yang memungkinkan pengukuran pengembangan khusus
2. Menyusun Program Penyelenggaraan Jalan Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan sebagai Program Utama Pencapaian Kinerja Sasaran 1. Hal ini untuk memenuhi pencapaian IKU DPUPR, mengatasi deviasi simpangan antara realisasi dan target kinerja berupa Persentase jalan dalam kondisi mantap dan sebagai upaya untuk menghadapi Tantangan 1.
3. Program prioritas kedua adalah Pemeliharaan Berkala dan Rutin dan Penggantian Jembatan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan sebagai bentuk perwujudan tujuan mempertahankan jalan dalam kondisi mantap
4. Melibatkan partisipasi masyarakat sekitar proyek dalam hal pengawasan
5. Melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat yang berpotensi atau telah terjadi konflik terkait opini sebagian masyarakat perihal kondisi jalan mantap yang tidak merata
6. Berkoordinasi dengan Bapperida terhadap aspirasi masyarakat dalam hal pengusulan pekerjaan terkait jalan dan jembatan, baik dari jalur Musrenbang

Bukti Dukung pada Laporan LKJIP bahwa Telah Memuat Alternatif Solusi dan Upaya Nyata terhadap Permasalahan yang Dihadapi



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG <small>Komplek Pusat Pemerintahan Kab. Lombok Tengah Gedung A lantai 4 Jln. Raden Puguh Praya</small>	
<b>NOTULA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2023</b>	
<b>Sidang/Rapat</b>	: Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023
<b>Hari/Tanggal</b>	: April 2023
<b>Waktu Sidang/Rapat</b>	: 08.00 Wita (Pasca Apel Pagi)
<b>Acara</b>	: Rangkaian Diskusi Pencapaian dan Pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023
<b>Lokasi</b>	: Ruang Rapat Kepala Dinas
<b>Pimpinan Sidang/Rapat Notula</b>	: <b>Ir. Lala Rahadian, M.Si / Kepala Dinas</b> : <b>Muhamad Sarjan, ST., MT / Sekretaris Dinas</b>
<b>Peserta Sidang/Rapat</b>	: a. Kepala Bidang Bina Marga b. Kepala Bidang Cipta Karya c. Kepala Bidang SDA d. Kepala Bidang Penataan Ruang e. Kasubag Perencanaan dan Keuangan f. Fungsional Perencana g. Kepala LPT Jasa Konstruksi h. Kepala LPT Peralatan dan Pengujian
<b>Acara Kegiatan</b>	
<b>1. Pembukaan</b>	: Kepala Dinas membuka secara singkat dan menyampaikan tujuan diadakannya rapat rutin di tiap hari Senin pada awal bulan, termasuk didalamnya membahas perihal capaian kinerja Program, permasalahan dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ada
<b>2. Pemaparan Capaian Kinerja Program Bidang</b>	: Kepala Dinas menyampaikan Laporan Triwulan I dan capaian pada masing-masing Program. Tereportkan bahwa kondisi realisasi fisik dan keuangan hingga bulan Maret Tahun 2023 baru terrealisasi sebesar Rp. 20.308.195.091,00 (14,06 %). (Laporan Terlampir)
<b>3. Konfirmasi Kepala Bidang terhadap Capaian Program</b>	: Terkonfirmasi bahwa yang keuangan dan fisik yang terrealisasi adalah gaji dan tambahan penghasilan, dan kegiatan lain seperti belanja modal (Dana DAK) sudah ada realisasi UMK
<b>4. Arahan Kepala Dinas dan Penutup</b>	: 1. Menekankan untuk terus memonitoring dan mengevaluasi hasil kerjanya sehingga di evaluasi berikutnya dapat mencapai target kinerja dan
	anggaran 2. Perlu untuk menganalisa data secara cermat, obyektif dan realistis 3. Penyampaian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan kontribusinya terhadap pelaporan capaian kinerja ini
<b>PIMPINAN RAPAT</b> Kepala Dinas  <b>Ir. Lala Rahadian, M.Si</b> NIP. 19671231 199203 1 117	<b>NOTULIS</b> Sekretaris Dinas,  <b>Muhamad Sarjan, ST., MT</b> NIP. 19761231 200112 1 009

Bukti Dukung Terkait Notula Pencapaian Triwulan dengan Kepala Dinas Sebagai Pimpinan Rapat (Merupakan Bentuk Perhatian Pimpinan OPD terhadap Pencapaian Kinerja)